

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, sektor pertanian memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Sektor pertanian sangat berperan guna kesejahteraan masyarakat khususnya di Indonesia, pertanian pun turut andil dalam perekonomian serta pembangunan nasional. Dengan demikian, dirasa diperlukannya pembangunan pada sektor pertanian demi kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan pemberdayaan petani, pembangunan industri pertanian, serta pemanfaatan teknologi yang ada dalam bidang pertanian serta peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada.

Sebagai negara agraris pertanian adalah sektor ekonomi terbesar di Indonesia, baik jika dilihat dari jumlah tenaga kerjanya maupun sumbangsuhnya terhadap pembentukan PDB. Pada awal tahun 2019, setidaknya terdapat 38,1 juta orang yang bekerja di sektor pertanian, atau lebih dar dua kali jumlah yang bekerja di industri manufaktur.

Jumlah petani di Indonesia terdapat sekitar 33,4 juta orang dengan mayoritas usia 50-60 tahun yang dirasa kurang cukup produktif. Sebaliknya untuk petani pada usia muda hanya terdapat 2,7 juta atau sekita 8% dari keseluruhan petani. Pertanian di Indonesia dinilai belum dapat berkembang dengan cukup optimal dikarenakan mayoritas petani menggunakan cara lampau/tradisional dengan alat seadanya, bahkan

masih banyaknya menjadi buruh penggarap lahan orang lain. Tidak hanya itu saja adapun beberapa faktor yang memengaruhi yaitu penyempitan lahan, harga pasar yang kurang menguntungkan, kurangnya perhatian pemerintah, kegiatan import yang dirasa merugikan petani kecil, aturan yang dikeluarkan tidak berorientasi pada petani serta lain sebagainya. Faktor diatas merupakan pengaruh perekonomian dirasa belum sejahtera, dengan hal ini diperlukannya peningkatan kualitas pada sektor pertanian salah satunya mengajak para pemuda milenial untuk diikut sertakan menjadi petani modern.

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan dalam sektor pertanian dengan jangka panjang sangat memperhatikan atau ditentukan oleh beberapa faktor, salah satu dari beberapa faktor tersebut ialah sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kualitas dalam dirinya serta memiliki komitmen untuk membngun sektor pertanian. Beberapa tahun belakang ini di beberapa negara dihadapi dengan permasalahan yang cukup serius khususnya pada sektor pertanian yaitu Fenomena Aging Farmer dimana jumlah tenaga kerja usia muda mengalami penurunan, sebaliknya semakin meningkat petani pada usia lebih dari 55 Tahun keatas.

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus memperkuat beberapa program yang dikembangkan pada sektor pertanian dengan mencetuskan program Petani Milenial. Salah satunya, menyosiasiliasikan program Petani Milenial dan berkolaborasi dengan kabupaten/kota. Selain sosialisasi, Pemda Provinsi Jabar akan melibatkan kabupaten/kota dalam rekrutmen program petani milenial, mengubah pola pendaftaran secara daring, luring, atau kombinasi keduanya, dan adanya award

bagi petani milenial dan kabupaten/kota yang berprestasi dalam mendukung program Petani Milenial.

Petani milenial merupakan petani pada rentang usia 19-39 dimana mereka memanfaatkan teknologi serta dinamis, dengan begitu terdapat banyaknya peluang bagi generasi milenial ini apabila dibandingkan dengan generasi sebelumnya dan pastinya harus adanya perhatian dari pemerintahan. Terdapat banyaknya program-program petani milenial yang sudah tersebar, dimaksudkan untuk mengajak para petani untuk dapat memperluas keahliannya serta pengetahuan dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Pernyataan tersebut dirasa dapat memperoleh nilai tambah serta peningkatan pada penjualan produk, peluang ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar memikat anak muda agar terjun ke dunia pertanian.

Pada masa pandemi yang telah kita lalui terdapat peningkatan disektor pertanian dibandingkan dengan sektor lainnya, dikarenakan mayoritas pekerja di PHK dan beralih profesi dengan bertani. Pada masa pandemi masyarakat sangat mementingkan kesehatannya dalam hal ini petani milenial mulai meningkatkan kualitas produk organik, banyaknya persaingan membuat setiap petani harus dapat mengembangkan sebuah inovasi agar tidak tertinggal, peningkatan kualitas dapat dimulai dari proses produksinya hingga pada masa panen.

Bentuk komitmen pemerintah dalam melahirkan jutaan petani milenial tersebut mendorong BPPSDMP memberikan ciri-ciri seperti diatas melalui langkah yang diambil kementerian ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dalam sektor

pertanian, secara nasional presentase jumlah usia muda yang bekerja dalam sektor pertanian terus menerus mengalami penurunan terutama dalam satu dekade terakhir.

Terdapat permasalahan pada sektor pertanian di Jawa Barat diantaranya, petani kesulitan dalam akses pasar, petani kesulitan dalam akses modal untuk pembiayaan produksi, serta teknologi digital belum banyak digunakan disektor pertanian yang dirasa teknologi digital ini memiliki peran aktif pada masa sekarang.

Program Petani Milenial Jawa Barat yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada tanggal 25 Maret 2021, merupakan langkah terobosan untuk mempercepat proses regenerasi petani. Program Petani Milenial Jawa Barat ini dirumuskan dalam rangka penguatan ketahanan pangan serta percepatan pemulihan ekonomi Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang dilakukan melalui upaya menumbuhkembangkan kewirausahaan pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan mendorong regenerasi petani dari kelompok milenial melalui pendekatan konsep pengembangan agribisnis yang maju, mandiri, modern, berdaya saing dan menguntungkan, serta pemanfaatan teknologi digital yang efektif dan efisien. Sebagai upaya meningkatkan produksi pangan, bahan baku industri pengolahan dan komoditas ekspor, mengurangi permasalahan keterbatasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan petani.

Konsep dasar petani milenial yang digagas Gubernur merupakan bersumber pada kemampuan petani dikala ini. Ciri petani Jawa Barat hari ini kurang lebih 75%

berumur 40 ke atas. Dengan konsep ini kita mulai modernisasi petani milenial dengan konsep 4.0, sehingga diharapkan Jabar dapat jadi lumbung pangan nasional.

Terdapat empat harapan pada program petani milenial ini diantaranya; menumbuh kembangkan kewirausahaan muda petani di Jawa Barat, mengganti wajah pertanian menjadi lebih baik atau fresh, supaya generasi milenial tertarik menjadi petani dengan pemanfaatan teknologi yang ada, menghasilkan pertanian yang lebih maju, mandiri, dan modern serta mengurangi permasalahan ketersediaan tenaga kerja petani di Jawa Barat.

Pertanian di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar, hal ini didukung atas kondisi geografis dan ekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian yang ditandai dengan banyaknya komoditas unggulan pada sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan serta perikanan. Petani milenial akan mendapatkan pelatihan serta pendampingan metode pertanian yang lebih efektif dan efisien. Dari mulai pengolahannya, pengembangan produk sampai dengan pemasaran hasil tani ataupun produk olahan baik dalam maupun luar negeri.

Terdapat beberapa komoditas yang sudah berjalan pada program petani milenial ini diantaranya peminat terbanyak yaitu pada komoditas kopi dimana sudah terdapat 20 orang yang sudah bergabung, pada komoditas cengkeh sebanyak sembilan orang, kelapa terdapat lima orang, sawit terdapat tiga orang, the terdapat dua orang, vanili satu orang, tembakau satu orang, tebu satu orang, lada satu orang, lada satu orang, karet satu orang, kapas satu orang, kapas satu orang, kakao satu orang, Ginseng

satu orang, total semua ada 52 orang dan 14 komoditas dalam program petani milenial ini.

Dilihat dari pernyataan diatas terdapat 52 calon petani milenial pada bidang perkebunan, 42 diantaranya sudah memiliki lahan sendiri sedangkan yang lainnya belum memiliki lahan sendiri. Terdapat 14 jenis peminatan komoditas yang dipilih calon petani milenial bidang perkebunan, 38% diantaranya memilih peminatan komoditas kopi. Dari 14 jenis peminatan komoditas yang dipilih, ternyata 6 diantaranya merupakan produk unggulan pertama di 167 Desa di Jawa Barat.

Program ini telah ditindak lanjuti melalui berbagai tahap Pembinaan Teknis (Bimtek) yang terbagi sesuai bidang peminatan komoditas, yaitu komoditas pada bidang: Perikanan, Peternakan, Pangan & Hortikultura, perkebunan serta kehutanan. Untuk sub sektor pekebunan telah dilakukan bimbingan teknis budidaya dan pengolahan kopi, bimtek pembenihan kopi dan vanili, bimtek budidaya tanaman vanili, serta bimtek pengolahan gula aren.

Program Petani Milenial Bidang Perkebunan Tahun 2021 saat ini diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang petani milenial dari 52 (lima puluh dua) orang hasil seleksi dengan komoditas dan rintisan usaha meliputi pengolahan kopi, pengolahan gula aren, pembenihan vanili dan kopi serta pengolahan limbah kelapa. Sebanyak 18 orang memiliki lahan dengan luasan bervariasi antara 200 m² sampai dengan 2 ha. Sedangkan sumber permodalan, sebanyak 5 (lima) orang telah memperoleh fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan (BNI), dan sianya menggunakan modal mandiri.

Tetapi inovasi program petani milenial ini masih terkendala beberapa hal. Pertama, kurangnya ketersediaan lahan pertanian yang menjadi penghambat masyarakat untuk terjun ke dalam bidang pertanian di kota/desa. Kedua, kurangnya minat anak muda/milenial untuk menjadi petani muda sebagai bentuk mata pencaharian dan dukungan percepatan pemulihan ekonomi di Jawa Barat,. Ketiga, kurangnya pemanfaatan teknologi digital para petani, padahal salah satu perangkat teknologi handphone dan internet sangat membantu untuk edukasi seputar tanaman dan pemasaran hasil tani kedepanya.

Dalam kebijakan perlu adanya implementasi. Tanpa implementasi maka kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar merupakan rencana indah yang tidak akan terwujud. Proses untuk melaksanakan kebijakan pemerintah perlu mendapatkan perhatian yang seksama karena banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Proses kebijakan merupakan proses dinamis, banyak faktor yang mempengaruhinya. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, yang akan mempengaruhi dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem kerja yang baik agar kebijakan itu dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan didalamnya membahas pengaturan penyelenggaraan Perkebunan meliputi: perencanaan,

penggunaan lahan, perbenihan, budi daya tanaman perkebunan, Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan Usaha Perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.

Selanjutnya, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan melalui Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi, pada tahap perencanaan, yaitu: Program Petani Milenial; kegiatan rintisan usaha Petani Milenial; Pemetaan optimalisasi pemanfaatan BMD; Skema pemasaran hasil produk Program Petani Milenial; dan penerapan teknologi digital. Pada tahap pelaksanaan, pendataan Calon Peserta Program Petani Milenial; fasilitasi lahan usahatani Petani Milenial; fasilitasi sarana dan prasarana pendukung; inventarisasi peluang pasar dan Off Taker; bimbingan teknik rintisan usahatani; pendampingan akses permodalan usahatani; pendampingan proses rintisan usaha tani; pembinaan kelembagaan usaha tani; dan pendampingan pemasaran produk usahatani. Serta tahap terakhir yaitu adanya evaluasi serta pelaporan hasil kerja.

Berdasarkan pemaparan di muka , peneliti terdorong untuk menjalankan penelitian lebih dalam tentang bagaimana penerapan inovasi kebijakan petani milenial di Provinsi Jawa Barat serta mengetahui berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan inovasi ini. Untuk itu peneliti mengambil judul

“Inovasi Kebijakan Program Petani Milenial di Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat)”

B. Identifikasi Masalah

Merujuk. dari. latar belakang. yang sudah dipaparkan diatas, Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Faktor kurangnya ketersediaan lahan pertanian yang menjadi penghambat masyarakat untuk terjun ke dalam bidang pertanian
2. Faktor Kurangnya minat anak muda untuk menjadi petani sebagai bentuk dukungan dan terlaksananya program petani milenial
3. Faktor Kurangnya pemanfaatan teknologi digital oleh para petani

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang di uraikan di atas , maka dapat di rumuskan perumusan masalah , yaitu :

1. Bagaimana *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif) dalam penerapan Inovasi Program Petani Milenial di Jawa Barat?
2. Bagaimana *Compability* (Kesesuaian) dalam penerapan Inovasi Program Petani Milenial di Jawa Barat?
3. Bagaimana *Compexity* (Kerumitan) dalam penerapan Inovasi Program Petani Milenial di Jawa Barat?

4. Bagaimana Tribility (Kemungkinan dicoba) dalam penerapan Inovasi Program Petani Milenial di Jawa Barat?
5. Bagaimana Observability (Kemudahan diamati) dalam penerapan Inovasi Program Petani Milenial di Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif) dalam penerapan Inovasi Program Petani Milenial di Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui Bagaimana *Compability* (Kesesuaian) dalam penerapan Inovasi Program Petani Milenial di Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui Bagaimana *Compexity* (Kerumitan) dalam penerapan Inovasi Program Petani Milenial di Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui Bagaimana Tribility (Kemungkinan dicoba) dalam penerapan Inovasi Program Petani Milenial di Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui Bagaimana Observability (Kemudahan diamati) dalam penerapan Inovasi Program Petani Milenial di Jawa Barat

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, tentunya diharapkan dapat mempunyai manfaat terutama dalam kemajuan ilmu pengetahuan yang menjadi sumber kajian dan acuan yang tentunya bisa memberikan informasi secara teoritik dan juga empiris kepada para pembaca ataupun kepada pihak peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang mengenai inovasi kebijakan program petani milenial dan bisa memperbanyak sumber dan kajian pustaka yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi/Pemerintah

Penelitian ini pastinya diharapkan bisa memberikan masukan dan juga gambaran untuk instansi/pemerintahan terkait dalam hal inovasi kebijakan program petani milenial dimasa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Peneliti ingin penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan juga pemahaman pada khalayak tentang inovasi kebijakan program petani milenial sebagai upaya pemulihan ekonomi pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti juga ingin penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti seterusnya untuk dijadikan bahan pembelajaran dan acuan saat melakukan penelitian lanjutan mengenai fokus kajian ini.

d. Bagi Peneliti

Peneliti ingin penelitian ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peneliti yang mempunyai nilai positif yang tentunya dapat membantu dalam meningkatkan pengalaman dan pengetahuan peneliti yang berhubungan dengan kondisi atau keadaan yang ada pada lingkungan instansi pemerintahan terutama yang berhubungan langsung dengan pembuatan kebijakan pada suatu instansi pemerintahan ataupun kebijakan sektor publik.

F. Kerangka Pemikiran

Terdapat beberapa jenis teori yang dikemukakan oleh para ahli yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan penerapan inovasi kebijakan, teori ini dianggap cukup berguna dalam mengukur pencapaian keberhasilan program petani milenial di Jawa Barat. Penerapan inovasi kebijakan di kupas tuntas dengan berbagai kaca dalam pengukurannya, teori yang digunakan dalam penelitian ini dikemukakan oleh Roger (dalam Erna, 2016: 7). Indikator yang diberikan dalam mengukur keberhasilan penerapan inovasi kebijakan publik terdapat 5 indikator diantaranya:

1. *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif)

Indikator ini memfokuskan terhadap nilai unggul yang diberikan dari inovasi yang ada, dimana inovasi ini memiliki keunggulan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Adanya nilai kebaruan yang terdapat dalam inovasi terset yang dinilai sebagai ciri yang membedakan dengan yang lain.

2. *Compability* (Kesesuaian Inovasi)

Indikator ini menilai inovasi memiliki sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang diganti, dimana ini dimaksudkan inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja. Dimana inovasi lama dianggap bagian dari suatu proses transisi ke inovasi yang yang dipakai saat ini. Selain itu dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi secara lebih cepat.

3. *Compelexity* (Kerumitan)

Dimana indikator ini dinilai dengan sifat yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Tetapi dengan inovasi yang baru dengan menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik maka tingkat kerumitan ini tidak lah menjadi masalah penting.

4. *Triability* (kemungkinan dicoba)

Indikator ini menilai bahwasannya inovasi hanya dapat diterima apabila inovasi tersebut telah teruji serta terbukti memiliki keuntungan atau nilai yang lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Sehingga inovasi ini telah melewati fase uji coba publik, dimana setiap orang atau pihak memiliki kesempatan untuk dapat menguji kualitas dari adanya inovasi tersebut.

5. *Observability* (Kemudahan diamati)

Indikator ini menilai inovasi harus dapat diamati dari bagaimana ia dapat bekerja serta menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Untuk mengetahui penerapan inovasi kebijakan petani milenial di Provinsi Jawa Barat, menurut (Rogers, 2003) dimana pengertian dari inovasi adalah suatu ide, penerapan atau materi yang baru untuk individu serta unit adopsi yang lain. Inovasi ini bertujuan guna menjadi solusi atas permasalahan dan pengembangan dari suatu produk pada instansi atau organisasi. Pada penerapannyaa inovasi mempunyai karakteristik yang melekat pada inovasi tersebut.

Munculah kerangka pemikiran untuk mendukung penelitian ini yang di olah menjadi sebuah bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

